



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap kesehatan masyarakat secara prima, profesional yang berdasarkan prinsip Manajemen Mutu yang konsisten dan komitmen tinggi untuk meningkatkan kemampuan pengujian berbasis kompetensi, maka perlu ditunjang dengan pembiayaan yang memadai;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk diatur jenis Retribusi Daerah terutama mengenai Retribusi Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
7. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan yang disingkat dengan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan urusan teknis di bidang Laboratorium Kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah tenaga teknis yang bekerja menghasilkan produk hasil uji pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Siak.
10. Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, bakteriologi, imunologi, patologi, virologi, atau bidang lain yang berkaitan pada kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk penerima atau pemotong retribusi tertentu.
16. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk pelayanan laboratorium kesehatan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang terdiri dari pemeriksaan laboratorium klinik (hematologi, kimia klinik, bakteriologi, parasitologi, imunologi, patologi, virologi, dan atau bidang lain), laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan (mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain) dan radiologi.
17. Jasa adalah pelayanan yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada pelanggan untuk kegiatan pemeriksaan laboratorium.
18. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
19. Tarif adalah besarnya biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibebankan kepada pelanggan sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
20. Sistem Paket adalah perhitungan pembiayaan dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.
21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah atas pemakaian sarana dan prasarana yang terdiri atas biaya operasional, biaya bahan dan biaya pemeliharaan yang digunakan langsung dalam proses pemeriksaan laboratorium.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium.
23. Pelanggan adalah setiap orang/Badan yang datang ke UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah untuk mendapatkan pelayanan laboratorium kesehatan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Imunologi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap sistem kekebalan tubuh manusia.

29. Bakteriologi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap makanan, air dan sputum.
30. Virologi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap virus di dalam tubuh manusia yang sangat membahayakan kesehatan.
31. Parasitologi adalah pemeriksaan yang dilakukan pada parasit yang hidup didalam tubuh manusia seperti pada malaria dan cacing.
32. Fisika air adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui suhu, rasa, bau, warna, kekeruhan dan zat padat yang terkandung dalam air.
33. Kimia air adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat zat kimia yang terkandung di dalam air sesuai dengan standart kondisi normal atau tidak normal.
34. Medical check up adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kesehatan seseorang dengan melakukan pengambilan sampel darah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan dan diberikan di UPTD, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari UPTD Labkesda.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari UPTD Labkesda diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenai retribusi adalah :
 - a. Semua jenis pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan oleh UPTD Labkesda yang dikelompokkan sebagai berikut:
 1. Laboratorium Klinis, yaitu :
 - a) Hematologi;
 - b) Kimia Klinik;
 - c) Bakteriologi;

- d) Parasitologi;
 - e) Imunologi;
 - f) Virologi; dan/atau
 - g) bidang lainnya.
2. Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan, yaitu :
- a) Mikrobiologi;
 - b) Fisika;
 - c) Kimia; dan/atau
 - d) bidang lainnya.
- b. Pengujian Kesehatan (*General Cek Up*, yang jenis dan macam pemeriksaan sesuai dengan permintaan); dan
- c. Pelayanan kesehatan yang lain sesuai dengan pengembangan UPTD Labkesda.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD Labkesda.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan setelah memperoleh pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal keadaan memaksa sehingga wajib retribusi atau keluarganya belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka wajib retribusi atau keluarganya wajib membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan retribusi.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN PENETAPAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 7

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

Retribusi terhutang terjadi saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan laboratorium, sarana laboratorium yang digunakan dan jasa pelayanan laboratorium yang diberikan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dimaksud.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium dilakukan dengan profesional, cepat dan tidak diskriminatif kepada semua masyarakat termasuk masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Siak.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN/PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kwitansi resmi sebagai barang bukti penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan di UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (3) Bentuk Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Untuk menjamin bukti pembayaran yang sah, kwitansi diberikan tanda khusus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

- (5) Dalam hal Labkesda melakukan investasi alat laboratorium atau sewa pakai atau sewa beli atau kerjasama operasional dengan pihak ketiga (*Vendor*), maka Kepala Labkesda dapat mengenakan biaya sewa pakai alat dengan besaran biaya sewa yang wajar dan terjangkau oleh pengguna pelayanan kesehatan.
- (6) Besaran biaya sewa pakai alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Labkesda dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (7) Pembayaran tunai retribusi pelayanan kesehatan pada Labkesda dibayar melalui kasir.
- (8) Pembayaran retribusi oleh pihak penjamin berbentuk Badan dan/atau asuransi sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (9) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibukukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
- (10) Hasil pungut retribusi dari UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak di setor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah diterima, kecuali jika hal itu terjadi pada hari libur atau keadaan-keadaan tertentu, maka penyetoran disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 14

Bendahara penerimaan/Bendahara penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi.

Pasal 15

Proses Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

1. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera dalam SKR/dokumen yang dipersamakan dengan SKR dari wajib retribusi dan atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang ditetapkan sesuai peraturan yang telah ditetapkan;
2. menyiapkan dan mengisi STS.
3. menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan STS ke Kas Daerah paling lambat 1 hari kerja setelah menerima uang;
4. mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen-dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
 - a. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
 - b. Nota Kredit;
 - c. Bukti Penerimaan yang sah; dan
 - d. Surat Tanda Setoran.
5. daftar STS yang dibuat bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu di dokumentasikan dalam Register STS;
6. bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan pertanggungjawaban administratif kepada pengguna anggaran dan laporan pertanggungjawaban fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi dan denda karena diluar kekuasaannya.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN PENETAPAN RETRIBUSI
DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan.
- (2) Ketentuan dan tata cara pembetulan penetapan retribusi dan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan dan tata cara penghapusan Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan dan pola tarif dari UPTD Labkesda.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
JASA PELAYANAN

Pasal 22

- (1) Jasa Pelayanan dapat diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja pada UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan keseluruhannya kepada UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Aparatur Sipil Negara tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Mei 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.15.B/2018

BAB XX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penyelenggaraan penggunaan hasil retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Mei 2018

WPlt. BUPATI SIAK, *f*

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, *f*

[Signature]
Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.15.B/2018

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	METODA PEMERIKSAAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	REAGEN dan BHP	TOTAL TARIF
1	2	3	4	5		6
I.	Pelayanan Konsultasi Khusus Medikolegal					
1	Dokter Umum		Rp 1,000	Rp 7,000	Rp 2,000	Rp 10,000
2	Dokter Spesialis		Rp 1,000	Rp 14,000	Rp 5,000	Rp 20,000
II.	AIR					
	A. Fisika					
1	Suhu		Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 6,000	Rp 9,000
4	Rasa		Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 6,000	Rp 9,000
5	Bau		Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 6,000	Rp 9,000
6	Warna		Rp 1,000	Rp 5,000	Rp 14,000	Rp 20,000
7	Kekeruhan	Photometri	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 6,000	Rp 9,000
8	Zat Padat Terlarut		Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 6,000	Rp 9,000
	B. Kimia Organik					
1	Aluminium Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 15,000	Rp 24,000
2	Arsenik Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 16,000	Rp 40,000	Rp 58,000
3	Iron (Besi)	Photometri	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 24,000	Rp 33,000
4	Cyanida	Photometri	Rp 2,000	Rp 11,000	Rp 36,000	Rp 49,000
5	Clorida Test Kid	Photometri	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 34,000	Rp 46,000
6	Copper (Tembaga) Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 45,000	Rp 55,000
7	Cadmium Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 20,000	Rp 30,000
8	Cromate Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 19,000	Rp 29,000
9	Nitrate Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 16,000	Rp 44,000	Rp 62,000
10	Nitrite Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 9,000	Rp 12,000	Rp 23,000
11	Manganese Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
12	Sulfate Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 9,000	Rp 30,000	Rp 41,000
13	Total Hardness test	Photometri	Rp 2,000	Rp 12,000	Rp 121,000	Rp 135,000
14	Zink (Seng) Test	Photometri	Rp 2,000	Rp 20,000	Rp 200,000	Rp 222,000
15	Flourida	Photometri	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 35,000	Rp 47,000
	C. Mikrobiologi					
1	E. Coli	Semi Quantitative	Rp 2,000	Rp 16,000	Rp 160,000	Rp 178,000
2	Coliform Test	Semi Quantitative	Rp 2,000	Rp 16,000	Rp 160,000	Rp 178,000
3	Pemeriksaan Air Lengkap		Rp 2,000	Rp 198,000	Rp 1,100,000	Rp 1,300,000

1	2	3	4	5		6
III. MAKANAN						
1	Deteksi Borax Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 20,000	Rp 26,000
2	Rhodamin B Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 20,000	Rp 26,000
3	Methil Yellow Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 20,000	Rp 26,000
4	Mercuri Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 25,000	Rp 32,000
5	Arsenik Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 36,000	Rp 45,000
6	Formalin Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 11,000	Rp 57,000	Rp 70,000
7	Clorine Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 6,000	Rp 32,000	Rp 40,000
8	Pestisida Test	Kualitatif/Colori Metri	Rp 2,000	Rp 60,000	Rp 300,000	Rp 362,000
9	E. Coli Test	Profil Metode	Rp 2,000	Rp 29,000	Rp 292,000	Rp 323,000
10	Coliform Test	Profil Metode	Rp 2,000	Rp 29,000	Rp 292,000	Rp 323,000
11	Hygiene Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 15,000	Rp 129,000	Rp 146,000
12	Pork Detection Test	Immunochromatografic	Rp 2,000	Rp 21,000	Rp 107,000	Rp 130,000
13	Deteksi Nitrate Test	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 17,000	Rp 23,000
14	Total microbe	Colori Metri	Rp 2,000	Rp 58,000	Rp 292,000	Rp 352,000
IV. KIMIA DARAH						
1	Gula Darah Sewaktu	Stik	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 18,000	Rp 24,000
2	Gula Darah Sewaktu	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 33,000	Rp 42,000
3	Gula 2 Jam PP	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 33,000	Rp 42,000
4	Total Protein	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 33,000	Rp 42,000
5	Albumin	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 38,000	Rp 47,000
6	Ureum	Automatik	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 41,000	Rp 51,000
7	Creatinin	Automatik	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 40,000	Rp 50,000
8	Uric Acid	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 37,000	Rp 46,000
9	Cholesterol	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 33,000	Rp 42,000
10	HDL Cholesterol	Automatik	Rp 2,000	Rp 17,000	Rp 87,000	Rp 106,000
11	LDL Cholesterol Direct	Automatik	Rp 2,000	Rp 26,000	Rp 133,000	Rp 161,000
12	LDL Cholesterol (RATIO*)	Automatik	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 46,000	Rp 53,000
13	Trigliserida	Automatik	Rp 2,000	Rp 9,000	Rp 46,000	Rp 57,000
14	Bilirubin Total	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 37,000	Rp 46,000
15	Bilirubin Direct	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 38,000	Rp 47,000
16	Bilirubin Indirect	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,000	Rp 38,000	Rp 47,000
17	Alkali Phospatase	Automatik	Rp 2,000	Rp 15,000	Rp 76,000	Rp 93,000
18	SGOT	Automatik	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 40,000	Rp 50,000
19	SGPT	Automatik	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 40,000	Rp 50,000

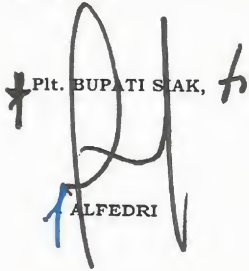
1	2	3	4	5		6
V.	HEMATOLOGI					
1	Hemoglobin	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
2	Hitung Jumlah Eritrosit	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
3	Hematokrit	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
4	Hitung Jumlah Lekosit	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
5	Hitung Jumlah Trombosit	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
6	Hitung Jenis Lekosit	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
7	Volume Eritrosit Rata-Rata (MCV)	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
8	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata (MCH)	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
9	Kosentrasi HB Eritrosit Rata-Rata (MCHC)	Blood Cell Counter	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
10	Morfologi Darah Tepi	Manual	Rp 2,000	Rp 25,000	Rp 8,000	Rp 35,000
11	Golongan Darah + Rhesus	Slide	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000	Rp 15,000
12	Laju Endap Darah	Westergreen	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 9,000	Rp 15,000
13	Waktu Pembekuan	IVY dan Duke	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 4,000	Rp 10,000
14	Waktu Pendarahan	Lee dan White	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 4,000	Rp 10,000
15	Darah Rutin (1,4,6,12)	Automatik	Rp 2,000	Rp 7,200	Rp 36,000	Rp 50,000
16	Darah Lengkap (1,2,3,4,5,....14)	Automatik	Rp 2,000	Rp 23,000	Rp 75,000	Rp 100,000
VI.	URINALISA					
1	Berat Jenis	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
2	PH	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
3	Protein	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
4	Glukosa Urin	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
5	Bilirubin	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
6	Sediment	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
7	Urobilinogen	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
8	Darah Samar	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
9	Keton	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
10	Nitrit	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 2,000	Rp 5,000	Rp 8,000
11	Urin Lengkap (1 s/d 10)	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 4,000	Rp 25,000	Rp 30,000
12	Urin Rutin (3,4,5,6)	Carik Celup/Tes strip	Rp 1,000	Rp 4,000	Rp 15,000	Rp 20,000
13	Tes Kehamilan	Latex Aglutinasi/ Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 4,000	Rp 15,000	Rp 20,000
VII.	Paket Medical Cek UP (MCU)					
1	MCU Standar (Darah lengkap,Urin Lengkap,OT,PT,URE,Creat,AU,Chol,GDS)		Rp 2,000	Rp 182,000	Rp 271,000	Rp 455,000
2	MCU Lengkap (Darah lengkap,Urin Lengkap,Bil,OT,PT,URE,Creat,AU,Chol,Trig, HDL, LDL,GDS)		Rp 2,000	Rp 254,000	Rp 379,000	Rp 635,000

1	2	3	4	5		6
VIII.	BAKTERIOLOGI					
1	Jamur	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
2	Malaria	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
3	Mikrofilaria	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
4	Candida	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
5	Trichomonas Vaginalis	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 22,000
6	Pewarnaan Gram	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 32,000
7	C. Diphteri	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
8	M. TBC	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 22,000
9	Pemeriksaan Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
10	Pemeriksaan Amuba	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
11	Kultur Bahan klinis dan Test Kepekaan	Biakan	Rp 2,000	Rp 90,000	Rp 135,000	Rp 225,000
IX.	TES NARKOBA					
1	Amphetamin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
2	Methamphetamin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
4	Morphin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
5	Marijuana	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
6	Benzodiazepin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
7	Cocain	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
X.	IMUNOSEROLOGI					
1	Remathoid Faktor	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
2	Anti Streptolisin O (ASTO)	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
4	TPHA	Hema Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 23,000	Rp 42,000	Rp 67,000
5	VDRL	Fluokolasi/ Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 9,000	Rp 45,000	Rp 75,000
6	NS1	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 12,000	Rp 60,000	Rp 100,000
7	HBS Ag	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 18,000	Rp 28,000
8	HBS Ab	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 18,000	Rp 28,000
9	TB Paru	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 48,000	Rp 60,000
10	Malaria	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 33,900	Rp 77,100	Rp 113,000
11	HIV Screening	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 39,000	Rp 89,000	Rp 130,000
12	Tubex Tes	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 43,800	Rp 100,200	Rp 146,000
13	Denque Igg,Igm	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 24,000	Rp 124,000	Rp 150,000

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

1	2	3	4	5		6
VIII.	BAKTERIOLOGI					
1	Jamur	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
2	Malaria	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
3	Mikrofilaria	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
4	Candida	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
5	Trichomonas Vaginalis	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 22,000
6	Pewarnaan Gram	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 32,000
7	C. Diphteri	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
8	M. TBC	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 22,000
9	Pemeriksaan Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
10	Pemeriksaan Amuba	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
11	Kultur Bahan klinis dan Test Kepekaan	Biakan	Rp 2,000	Rp 90,000	Rp 135,000	Rp 225,000
IX.	TES NARKOBA					
1	Amphetamin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
2	Methamphetamin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
4	Morphin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
5	Marijuana	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
6	Benzodiazepin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
7	Cocain	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
X.	IMUNOSEROLOGI					
1	Remathoid Faktor	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
2	Anti Streptolisin O (ASTO)	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
4	TPHA	Hema Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 23,000	Rp 42,000	Rp 67,000
5	VDRL	Fluokolasi/ Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 9,000	Rp 45,000	Rp 75,000
6	NS1	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 12,000	Rp 60,000	Rp 100,000
7	HBS Ag	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 18,000	Rp 28,000
8	HBS Ab	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 18,000	Rp 28,000
9	TB Paru	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 48,000	Rp 60,000
10	Malaria	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 33,900	Rp 77,100	Rp 113,000
11	HIV Screening	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 39,000	Rp 89,000	Rp 130,000
12	Tubex Tes	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 43,800	Rp 100,200	Rp 146,000
13	Denque Igg,Igm	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 24,000	Rp 124,000	Rp 150,000

Pt. BUPATI SLAK, 
ALFEDRI

1	2	3	4	5		6
VIII.	BAKTERIOLOGI					
1	Jamur	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
2	Malaria	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
3	Mikrofilaria	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
4	Candida	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
5	Trichomonas Vaginalis	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 22,000
6	Pewarnaan Gram	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 20,000	Rp 32,000
7	C. Diphteri	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
8	M. TBC	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 22,000
9	Pemeriksaan Telur Cacing	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
10	Pemeriksaan Amuba	Mikroskopis	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 27,000
11	Kultur Bahan klinis dan Test Kepekaan	Biakan	Rp 2,000	Rp 90,000	Rp 135,000	Rp 225,000
IX.	TES NARKOBA					
1	Amphetamin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
2	Methamphetamin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
4	Morphin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
5	Marijuana	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
6	Benzodiazepin	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
7	Cocain	Rapid Tes	Rp 1,000	Rp 10,000	Rp 32,000	Rp 43,000
X.	IMUNOSEROLOGI					
1	Remathoid Faktor	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
2	Anti Streptolisin O (ASTO)	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
3	C. Reaktif Protein (CRP)	Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 15,000	Rp 25,000
4	TPHA	Hema Aglutinasi	Rp 2,000	Rp 23,000	Rp 42,000	Rp 67,000
5	VDRL	Fluokolasi/ Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 9,000	Rp 45,000	Rp 75,000
6	NS1	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 12,000	Rp 60,000	Rp 100,000
7	HBS Ag	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 18,000	Rp 28,000
8	HBS Ab	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 18,000	Rp 28,000
9	TB Paru	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 10,000	Rp 48,000	Rp 60,000
10	Malaria	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 33,900	Rp 77,100	Rp 113,000
11	HIV Screening	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 39,000	Rp 89,000	Rp 130,000
12	Tubex Tes	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 43,800	Rp 100,200	Rp 146,000
13	Denque Igg,Igm	Rapid Tes	Rp 2,000	Rp 24,000	Rp 124,000	Rp 150,000

Plt. BUPATI SLAK,

ALFEDRI